

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan daerah pinggiran terbesar dapat dilihat dari adanya alih fungsi (konversi) guna lahan kawasan dari kawasan pertanian ke nonpertanian yang terjadi secara besar-besaran. Tanpa adanya pengaturan yang mendasar, alih fungsi ini dengan berbagai dampak negatifnya akan terjadi lebih luas lagi (Komarudin, 1996:10).

Menurut Menpera (Kompas.com 17 Desember 2010) saat menyampaikan pendapat akhir Presiden terhadap RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Rapat Paripurna DPR RI tahun 2010 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Jumat. “*Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman* secara keseluruhan mencerminkan adanya keberpihakan yang kuat sekaligus memberikan kepastian bermukim terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.”

Menurut Menpera juga bahwa UU ini diorientasikan dalam rangka menjamin kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Di kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman, terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan. Hal ini tentu berdampak pada sosial ekonomi masyarakat setempat yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian.

Masyarakat di sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebelum dibangunnya perumahan, mayoritas bekerja sebagai petani dan penggarap sawah.

Pada periode sebelum dibangunnya perumahan Puri Asoka, lokasi perumahan merupakan daerah kampung dengan akses jalan kurang memadai dan kampung ini pun kurang memiliki daya tarik sosio-ekonomi karena sektor pekerjaan yang tersedia hanya sebagai petani dan buruh tani. Kemudian terjadi pengembangan kompleks perumahan yang mengalihkan fungsi lahan persawahan.

Kini sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sudah menjadi kawasan yang ramai penduduk. Di area pinggiran perumahan, selain penduduk setempat yang sudah lama bermukim, banyak juga pendatang yang “mengadu nasib” mencari pekerjaan, ada yang berdagang, ada pula yang usaha di bidang jasa, bengkel, dll. Sebagian warga setempat masih bekerja menggarap sawah karena masih ada sebagian lahan sawah yang belum terkena proyek perumahan. Sementara sebagian buruh tani yang lain sudah kehilangan pekerjaan lamanya, lahan sawah yang mereka garap dialihfungsikan menjadi area perumahan. Dengan demikian sebagian buruh tani menganggur atau beralih ke pekerjaan lain, kebanyakan beralih ke sektor jasa seperti bengkel, tambal ban, tukang becak atau menjadi pedagang kecil seperti warung-warung, *counter pulsa*, warung nasi dan tukang kerupuk.

Selain itu, hadirnya masyarakat baru yaitu kelas menengah ke atas yang secara geografis tinggal bersama warga setempat, membawa pengaruh tersendiri terhadap perubahan tatanan sosial ekonomi masyarakat setempat. Salah satu contohnya adalah dalam proses gotong royong kebersihan lingkungan, mulanya warga terbiasa gotong royong bersama. Warga kelas menengah di perumahan jarang terlibat di kegiatan gotong royong dan lebih memilih tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan masyarakat setempat, meski mereka tetap memberikan kompensasi berupa uang kepada masyarakat setempat. Dengan demikian, masyarakat setempat pun mendapatkan keuntungan.

Perubahan sosial ekonomi yang merupakan dampak pengembangan perumahan pada warga sekitar perumahan Puri Asoka berdampak pada hubungan sosial, tingkat pendidikan dan pekerjaan warga Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, di mana sebagian warga kelurahan Mangunsuman menjadi kehilangan sikap peduli pada sesama, perubahan tingkat pendidikan dan pergeseran pekerjaan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, meskipun di sisi lain juga memunculkan pekerjaan baru yang berhubungan dengan kepentingan warga perumahan, seperti *laundry* dan penjual sayur.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Terhadap Masyarakat Setempat (Studi Kasus di Perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan perumahan Puri Asoka berdampak sosial ekonomi terhadap warga Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan: Bagaimana dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Puri Asoka Terhadap Masyarakat Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan Puri Asoka Terhadap Masyarakat Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat diperoleh manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tulis menulis khususnya yang berkaitan dengan dampak pembangunan terhadap masyarakat.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat berguna bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan dampak sosial ekonomi pembangunan perumahan terhadap masyarakat setempat.

3. Bagi Pemerintah

Menjadi sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah maupun pusat mengenai dampak sosial ekonomi pembangunan perumahan terhadap masyarakat setempat, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan pemerintah yang lebih berkeadilan dalam penataan ruang perumahan.

F. Batasan Penelitian

Sehubungan dengan dampak sosial ekonomi sangat luas cakupannya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi tiga indikator yang akan diteliti, yaitu: Dampak Hubungan Sosial Warga Perumahan, Pendidikan Warga Perumahan dan Pekerjaan Warga Perumahan Terhadap Masyarakat Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

G. Landasan Teori

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan memiliki arti yang sangat luas. Pembangunan seringkali diartikan oleh masyarakat secara sederhana sebagai kegiatan yang dilakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan dapat

diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi¹. Selain itu, menurut Supardi², pembangunan adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Pembangunan yang terjadi bukan hanya dalam struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut perubahan dalam struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa kegiatan pembangunan memberikan dampak, tidak hanya pada bentang alam namun juga pada struktur masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Seperti pada hasil Ilhamdaniah³ yang diketahui bahwa pembangunan perumahan karena adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan/berdampak pada struktur kepemilikan lahan. Hal ini didukung fakta bahwa para pengembang perumahan mengupayakan mengubah status kepemilikan lahan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, agar dapat dilakukan pengadaan lahan untuk pembangunan wilayah menjadi perumahan. Status kepemilikan yang beragam menyulitkan penguasaan dan pemilikan lahan bagi pengembang lahan. Namun apabila pengembang mampu menguasai lahan dalam hak guna bangunan dalam satu sertifikat induk, kecepatan perkembangan luas area perumahan setelah pemekaran kota akan lebih cepat. Masyarakat yang terkena pembebasan lahan, banyak beralih pekerjaannya.

¹ (Nugroho dan Dahuri 2004)

² Supardi (1994)

³ Ilhamdaniah (2011)

2. Konsep Perumahan dan Permukiman

a. Pengertian perumahan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.⁴

Masyarakat manusia mulai membangun rumah setelah meninggalkan cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Dalam tradisi masyarakat tradisional, rumah, lebih dari sekedar tempat bernaung dari cuaca dan segala hal yang dianggap musuh, sarat dengan makna-makna sebagai hasil pengejawantahan budaya, tradisi dan nilai-nilai yang dianut. Rumah dianggap sebagai mikrokosmos, yang merupakan bagian dari makrokosmos di luarnya serta lingkungan alam secara luas. Ini berarti bahwa manusia, konstruksi rumah, bahan bangunan serta lingkungannya seperti gunung, batu alam, pohon atau tumbuhan lainnya dapat disamakan sebagai makhluk hidup, bukan benda mati.

⁴ Eko Budiharjo. *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, hlm.4.

Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (*house, dwelling, shelter*) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Jika ditinjau secara lebih dalam rumah tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga di mana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya.⁵

Dalam pandangan ini rumah lebih merupakan suatu sistem sosial ketimbang sistem fisik. Hal ini disebabkan rumah berkaitan erat dengan manusia, yang memiliki tradisi sosial, perilaku dan keinginan-keinginan yang berbeda dan selalu bersifat dinamis, karenanya rumah bersifat kompleks dalam mengakomodasi konsep dalam diri manusia dan kehidupannya. Beberapa konsep tentang rumah:

- 1) Rumah sebagai pengejawantahan jati diri; rumah sebagai simbol dan pencerminan tata nilai selera pribadi penghuninya
- 2) Rumah sebagai wadah keakraban ; rasa memiliki, rasa kebersamaan, kehangatan, kasih dan rasa aman
- 3) Rumah sebagai tempat menyendiri dan menyepi; tempat melepaskan diri dari dunia luar, dari tekanan dan ketegangan, dari dunia rutin
- 4) Rumah sebagai akar dan kesinambungan; rumah merupakan tempat kembali pada akar dan menumbuhkan rasa kesinambungan dalam untaian proses ke masa depan.
- 5) Rumah sebagai wadah kegiatan utama sehari-hari
- 6) Rumah sebagai pusat jaringan sosial
- 7) Rumah sebagai Struktur Fisik⁶

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi masalah yang cukup serius. Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya

⁵ Aminudin, *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, Kanisius, Semarang, 2007.hlm.12

⁶Hendrawan, *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.hlm.54

seringkali sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang *prestise* karena kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu.

Masalah perumahan di Indonesia berakar dari pergeseran konsentrasi penduduk dari desa ke kota. Pertumbuhan penduduk kota di Indonesia cukup tinggi, sekitar 4 % pertahun, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional, dan cenderung yang terus meningkat menunjukkan kecenderungan tinggi tumbuhnya kota-kota di Indonesia. Sayangnya, terjadi keadaan yang tidak sesuai antara tingkat kemampuan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk lapangan kerja yang ada di perkotaan, mengakibatkan timbulnya kelas sosial yang tingkat ekonominya sangat rendah. Hal ini berakibat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kaum papa itu yang dapat dikatakan sangat minim. Rumah dan tempat hunian mereka tidak lebih merupakan tempat untuk tetap *survive* di tengah kehidupan kota. Kualitas permukiman mereka dianggap rendah dan tidak memenuhi standar hidup yang layak.⁷

Berbagai program pengadaan perumahan telah dilakukan pemerintah dan swasta (*real estat*). Tetapi apa yang dilakukan belum mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi jumlah ternyata Pemerintah dan swasta hanya mampu menyediakan lebih kurang 10% saja dari

⁷Widyaningsih, *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Perumahan*, Tarsito. Bandung. 2006.hlm.1

kebutuhan rumah, sementara sisanya dibangun sendiri oleh masyarakat. Dari segi kualitas, banyak pihak yang berpendapat bahwa program yang ada belum menyentuh secara holistik dimensi sosial masyarakat, sehingga masih perlu diupayakan perbaikan-perbaikan.⁸

b. Pengertian Permukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan. Parwata (2004) menyatakan bahwa permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Permukiman (*Settlement*) merupakan suatu proses seseorang mencapai dan menetap pada suatu daerah (Van der Zee 1986).

⁸ *Ibid.* hlm.15

Kegunaan dari sebuah permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi.

Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari:

- 1) Isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat;
- 2) Wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen- elemen buatan manusia.

Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam lima elemen yaitu:

- 1) Alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan dan iklim;
- 2) Manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb.), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional dan nilai moral;
- 3) Masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi;
- 4) Fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dsb.), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi; serta
- 5) Jaringan (*network*) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, serta tata letak fisik.

c. Pola Penyebaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pola penyebaran pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah desa kota menurut Koestoer (1995), pembentukannya berakar dari pola campuran antara ciri perkotaan dan perdesaan. Ada perbedaan mendasar pola pembangunan permukiman di perkotaan dan perdesaan. Wilayah permukiman di perkotaan sering disebut sebagai daerah perumahan, memiliki keteraturan bentuk secara fisik. Artinya sebagian besar rumah menghadap secara teratur ke arah kerangka jalan yang ada dan sebagian besar terdiri dari bangunan permanen, berdinding tembok dan dilengkapi dengan penerangan listrik. Kerangka jalannya pun ditata secara bertingkat mulai dari jalan raya, penghubung hingga jalan lingkungan atau lokal.

Karakteristik kawasan permukiman penduduk perdesaan ditandai terutama oleh ketidakteraturan bentuk fisik rumah. Pola permukimannya cenderung berkelompok membentuk perkampungan yang letaknya tidak jauh dari sumber air, misalnya sungai. Pola permukiman perdesaan masih sangat tradisional banyak mengikuti pola bentuk sungai, karena sungai disamping sebagai sumber kehidupan sehari-hari juga berfungsi sebagai jalur transportasi antar wilayah.

Perumahan di tepi kota (desa dekat dengan kota) membentuk pola yang spesifik di wilayah desa kota. Pada saat pengaruh perumahan kota menjangkau wilayah ini, pola permukiman cenderung lebih teratur dari pola sebelumnya. Selanjutnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan kota

banyak mempengaruhi perubahan pola penggunaan lahan dan pada gilirannya permukiman perdesaan berubah menjadi pola campuran. Ada bagian kelompok perumahan yang tertata baik menurut kerangka jalan baru yang terbentuk, tetapi dibagian lain masih ada pula yang tetap berpola seperti sediakala yang tidak teratur dengan bangunan semi permanen.

d. Undang-Undang Perumahan dan Permukiman

Permukiman bukan sarana pendorong terciptanya segregasi yang menuju disintegrasi seperti sekarang ini, tetapi sebaliknya, Permukiman harus dapat memperkuat kesetaraan manusia dan rasa kesatuan bangsa. Karena itu keterpaduan sosial dan kelestarian sumber daya alam akan menjadi landasan pokok bertindak.

Permukiman merupakan suatu kesinambungan ruang kehidupan dari seluruh unsurnya, baik yang alami maupun non alami, yang saling mendukung dan melindungi, secara fisik, sosial dan budaya. Keanekaragaman kondisi sosial budaya, sosial ekonomi dan fisik serta dinamika perubahannya akan menjadi dasar pertimbangan utama pengelolaan dan pengembangan permukiman, tidak untuk memisah-misahkannya, melainkan untuk saling “berpadu padan” secara sosial maupun fungsional, agar semua orang itu dapat hidup secara lebih sejahtera dan saling menghormati, mempunyai akses terhadap prasarana dasar dan pelayanan Permukiman yang sesuai secara berkelayakan, dan mampu memelihara serta meningkatkan kualitas lingkungannya.

Pasal 3 Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman⁹ (selanjutnya disebut UUp), menyebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah untuk melakukan integrasi sosial, ekologis dan fungsional yang menjamin peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian perumahan dan permukiman mempunyai peranan strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian penghuninya, sehingga perumahan dan permukiman bukan lagi hanya semata-mata sebagai sarana kehidupan belaka, tetapi juga merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya dan menampakkan jati diri.

Pasal 5 dan 6 UUPLH¹⁰ menyebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup dan hak peran serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.

⁹Undang-undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

¹⁰ Undang-undang tentang Pemukiman dan Lingkungan Hidup

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Kekurangtepatan pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakatnya telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut:

- a. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*).
- b. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju.
- c. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) periphery terhadap center.
- d. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap negara/pemerintah.
- e. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan dll) terhadap pemilik modal.

Pada pokoknya, pendekatan konvensional ini ditandai oleh *transplantatif planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai mengalami pergeseran dari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, yaitu:

- a. Pembangunan wilayah (*regional development*)
- b. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*).
- c. Pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*).
- d. Pembangunan berpusat pada rakyat (*people-centered development*).
- e. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

f. Pembangunan berbasis kelembagaan (*institution-based development*).

(Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat - ITB)¹¹

Ciri mencolok yang membedakan pendekatan alternatif ini adalah penekanannya terhadap lokalitas, baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan, maupun kultur. Implikasi kebijakan pendekatan ini adalah penekanan pada *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment*, dan *participative*, semuanya ini terkenal dengan Pembangunan Komunitas (*Community Development*).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan *makro* dan *mikro*. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati

¹¹Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat - Bahan Kuliah PPS SP. ITB 2010

oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konskuensi dari

pergeseran paradigme pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antara orang, organisasi atau komunitas. Perubahan dapat menyangkut struktur sosial atau pola nilai dan norma serta peranan. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya, meskipun para Sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat.

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan, dibekali akal-budi untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan manusia terletak

pada akal-budi tersebut, yakni sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal merupakan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah-masalah hidup yang dihadapinya. Budi merupakan bagian dari kata hati, berupa paduan akal dan perasaan, yang dapat membedakan antara baik dan buruk sesuatu.

Dengan bekal akal-budi tersebut manusia memiliki tujuh kemampuan yang berfungsi untuk: menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbaiki, memperbarui, mengembangkan dan meningkatkan segala hal dalam interaksinya dengan alam maupun manusia lainnya (Herimanto dan Winarno, 2009).

Ketujuh kemampuan tersebut merupakan potensi yang dimiliki manusia untuk kepentingannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mempertahankan dan meningkatkan derajat kehidupannya, mengembangkan sisi kemanusiaannya, dengan cara menciptakan kebudayaan (selanjutnya manusia juga mengkreasi, memperlakukan, memperbaiki, memperbarui, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan).

Kebudayaan yang dihasilkan melalui akal budi manusia sering menjadi pencetus terjadinya perubahan sosial. Artinya perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Bahkan Kingsley Davis (Soerjono Soekanto, 2000) berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Adapun menurut PB Horton dan CL Hunt

(1992), hampir semua perubahan besar mencakup aspek sosial budaya. Oleh karena itu dalam menggunakan istilah perubahan sosial dan perubahan budaya, perbedaan di antara keduanya tidak terlalu diperhatikan. Di samping itu, kedua istilah tersebut seringkali ditukar-pakaikan; kadangkala digunakan istilah perubahan sosial-budaya (*sociocultural change*) agar dapat mencakup kedua jenis perubahan tersebut. Yang jelas perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama yaitu kedua-duanya bersangkutan-paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Ada beberapa yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial, masuknya sesuatu unsur yang umumnya terjadi secara selektif dari suatu pola kebudayaan ke pola lain akan menimbulkan perubahan pada unsur yang dimasukinya. Proses difusi ini dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan syarat-syarat yang mempermudah dan mempercepat penerimaan unsur baru. Inovasi (pendapat baru) juga merupakan pendorong pada perubahan sosial. Inovasi juga berasal dari pola sendiri atau difusi unsur dari luar, adanya suatu teknologi baru atau bentuk organisasi baru. Selain itu faktor lain yang mendorong terjadinya perubahan adalah konflik, yang dapat saja terjadi dimana suatu golongan justru bersikeras mengikuti norma-normanya sendiri. Masalah sosial yang terjadi karena konflik dapat menghasilkan perubahan sosial, atau sebaliknya perubahan sosial menghasilkan masalah sosial (Pudjiwati Sajogo, 1985).

a. Konsep Perubahan Sosial Menurut Para Ahli

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru (berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya). Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai - nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Berikut ini merupakan definisi perubahan sosial yang dikemukakan oleh para Sosiolog:

1) Kingsley Davis:

Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurutnya, timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan dalam hubungan-hubungan antara buruh dengan majikan, dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik

2) John Lewis Gillin dan John Philip Gillin:

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang diterima, akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat.

3) Robert M. MacIver:

Perubahan-perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial

4) Selo Soemarjan :

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

5) William F. Ogburn:

Perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat.

Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau / sebelumnya, untuk memahami perbedaan keadaannya.

b. Teori Perubahan Sosial

Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan bagi kita dalam memahami perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Teori perubahan sosial tersebut di antaranya adalah:

1) Teori Evolusi (*Evolutionary Theory*)

Menurut James M. Henslin (2007), terdapat dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yakni teori unilinier dan teori multilinier. Pandangan teori unilinier mengamsusikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks (sempurna), dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Salah satu dari teori ini yang pernah mendominasi pemikiran Barat adalah teori evolusi dari Lewis Morgan, yang menyatakan bahwa semua masyarakat berkembang melalui tiga tahap: kebuasan, barbarisme, dan peradaban.

Dalam pandangan Morgan, Inggris (masyarakatnya sendiri) adalah contoh peradaban. Semua masyarakat lain ditakdirkan untuk mengikutinya. Pandangan teori multilinier menggantikan teori unilinier dengan tidak mengamsusikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama, artinya meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat yang lain.

Inti teori evolusi, baik yang unilinier maupun multilinier, ialah asumsi mengenai kemajuan budaya, di mana kebudayaan Barat dianggap sebagai tahap kebudayaan yang maju dan superior/sempurna. Namun, ide ini terbantahkan dengan semakin meningkatnya apresiasi terhadap kekayaan keanekaragaman (kompleksitas) dari kebudayaan suku bangsa di dunia.

Di samping itu, masyarakat Barat sekarang berada dalam krisis (rasisme, perang, terorisme, perkosaan, kemiskinan, jalanan yang tidak aman, perceraian, sex bebas, narkoba, AIDS dan sebagainya) dan tidak lagi dianggap berada di puncak kebudayaan manusia.

2) Teori Siklus (*Cyclical Theory*)

Menurut PB Horton dan CL Hunt (1992) dalam bukunya "Sociology", para penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat, tetapi mereka berpandangan bahwa proses perubahan masyarakat bukannya berakhir pada tahap "terakhir" yang sempurna, tetapi berlanjut menuju tahap kepunahan dan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Beberapa dari penganut teori siklus tersebut dipaparkan sebagai berikut:

Menurut pandangan seorang ahli filsafat Jerman, Oswald Spengler (1880-1936) setiap peradaban besar mengalami proses pentahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Oswald

Spengler terkenal dengan karyanya “The Decline of the West”/Keruntuhan Dunia Barat.

Pitirim Sorokin (1889-1968) seorang ahli Sosiologi Rusia berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir, yang meliputi:

- a) Kebudayaan ideasional (*ideational cultural*) yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati (super natural);
- b) Kebudayaan idealistis (*idealistic culture*) di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal; dan
- c) Kebudayaan sensasi (*sensate culture*) di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Arnold Toynbee (1889-1975), seorang sejarawan Inggris juga menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Menurutnya peradaban besar muncul untuk menjawab tantangan tertentu, tetapi semuanya telah punah kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini juga tengah beralih menuju ke tahap kepunahannya.

3) Teori Fungsionalis (*Functionalist Theory*)

Penganut teori ini memandang setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu bagian masyarakat akan menimbulkan

perubahan pada bagian yang lain pula. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan (menjadi cara hidup masyarakat). Oleh sebab itu menurut teori ini unsur kebudayaan baru yang memiliki fungsi bagi masyarakat akan diterima, sebaliknya yang disfungsional akan ditolak.

Menurut sosiolog William Ogburn, meskipun unsur - unsur masyarakat saling berhubungan, beberapa unturnya bisa berubah sangat cepat sementara unsur yang lain berubah secara lambat, sehingga terjadi apa yang disebutnya dengan ketertinggalan budaya (*cultural lag*) yang mengakibatkan terjadinya kejutan sosial pada masyarakat, sehingga mengacaukan keseimbangan dalam masyarakat. Menurutnya, perubahan benda-benda budaya materi/teknologi berubah lebih cepat daripada perubahan dalam budaya non materi/ sistem dan struktur sosial. Dengan kata lain, kita berusaha mengejar teknologi yang terus berubah, dengan mengadaptasi adat dan cara hidup kita untuk memenuhi kebutuhan teknologi (Henslin, 2007).

4) Teori Konflik (*Conflict Theory*)

Menurut pengikut teori ini, yang konstan (tetap terjadi) dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas

kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karena konflik sosial berlangsung secara terus menerus, maka perubahanpun juga demikian adanya.

Menurut Karl Marx, konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Perubahan akan menciptakan kelompok dan kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan kelas sosial baru tersebut akan melahirkan perubahan berikutnya. Menurutnya, konflik paling tajam akan terjadi antara kelas Proletariat (buruh yang digaji) dengan kelas Borjuis (kapitalis/pemilik industri) yang diakhiri oleh kemenangan kelas proletariat, sehingga terciptalah masyarakat tanpa kelas (PB Horton dan CL. Hunt,1992). Namun asumsi Marx terhadap terciptanya masyarakat tanpa kelas tersebut sampai saat ini tidak terbukti. Artinya kehidupan masyarakat tetap diwarnai adanya perbedaan kelas sosial.

c. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Di dalam kehidupan masyarakat dapat kita jumpai berbagai bentuk perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut: (Henslin, 2007; PB Horton dan CL Hunt, 1992; Soerjono Soekanto, 2000)

1) Perubahan Sosial secara Lambat

Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti.

Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan.

Perubahan secara lambat terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu.

2) Perubahan Sosial secara Cepat

Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

3) Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung/berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.

4) Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang

terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi - industrialisasi.

5) Perubahan Sosial yang Direncanakan (Dikehendaki)

Perubahan Sosial yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *Agent of change* (agen perubahan), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga - lembaga kemasyarakatan, serta memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial.

Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan *Agent of change* tersebut. Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau yang biasa disebut sebagai perencanaan sosial.

6) Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan (Tidak Dikehendaki)

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan/dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Konsep perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki tidak mencakup pengertian apakah perubahan-perubahan tadi diharapkan atau tidak diharapkan oleh masyarakat. Karena bisa terjadi, perubahan yang

tidak direncanakan/tidak dikehendaki ternyata diharapkan dan diterima oleh masyarakat, seperti reformasi yang terjadi di Indonesia.

dinamakan *social engineering* atau sering di sebut *social planning*.

b. Perubahan Sosial di Bidang Ekonomi

Perubahan sosial selalu terjadi dan mencakup semua bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Perubahan sosial dibidang ekonomi mencakup gaya hidup dan aktivitas ekonomi pada masyarakat. Perubahan ini tentu saja ada dampak baik dan buruknya.¹²

1) Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif adalah fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Penyebab utamanya adalah rasa gengsi di masyarakat dan keinginan akan mengikuti sebuah trend. Salah satu contohnya yang fenomenal adalah fenomena mengganti smartphone baru dan makan-makanan yang mewah. Itu disebabkan karena mereka merasa gengsi dan tergiur dengan diskon yang tidak biasa terjadi. Akibatnya, kemiskinan semakin merajalela akibat sifat boros ini.

2) Menyukai Produk Luar Negeri

Sejak bangsa kita dijajah, kita mulai 'dihipnotis' oleh mereka supaya kita menganggap bahwa produknya lebih baik daripada produk dalam negeri. Hal ini membuat kita selalu memilih produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri. Apalagi dengan masuknya budaya asing

¹² Hedi Sasrawan – Perubahan Sosial 2015 diunggah Juni 2015

dengan mudah ke Indonesia, kecintaan masyarakat akan produk luar negeri semakin meningkat.

3) Korupsi

Sifat manusia yang tidak pernah puas dan cenderung lebih memikirkan dirinya sendiri menghasilkan budaya korupsi. Budaya ini tentu saja sangat merugikan negara. Seharusnya uang tersebut digunakan untuk membangun sarana yang baik untuk rakyat, malah digunakan untuk memenuhi rasa kerakusan para pejabat.

4) Berutang

Kebiasaan berutang dan mencicil sudah mulai tumbuh sejak ada gaya hidup boros. Mereka menjadi suka berutang untuk membeli kebutuhan pokok. Sementara untuk memenuhi keinginannya (bukan kebutuhan) yang mahal, mereka mencicilnya.

5) Kesadaran Menabung Meningkat

Kesadaran untuk menabung semakin meningkat. Hal ini mungkin dikarenakan bunga deposito yang semakin tinggi dan berbagai penawaran menarik dari bank. Selain itu, kesadaran untuk berasuransi juga meningkat.

5. Konsep Sosial Ekonomi

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang

kesejahteraan yang ruanglingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (KBBI,1996:958). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material. Kebutuhan pokok dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia. Abraham Maslow mengungkapkan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan dihargai dan kebutuhan mengaktualisasikan diri.

Menurut Melly G Tan bahwa kedudukan sosial ekonomi mencakup 3 (tiga) faktor yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Pendapat diatas didukung oleh Mahbud Ul Haq dari Bank Dunia bersama dengan James Grant dari Overseas Development Council mengatakan bahwa kehidupan sosial ekonomi di titik beratkan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang sehat yang didukung oleh pekerjaan yang layak (Melly Dalam

Susanto, 1984).

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk mampu menempatkan diri dalam lingkungannya sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi kebutuhan hidupnya.

Melly G. Tan mengatakan untuk melihat kondisi sosial ekonomi keluarga atau masyarakat itu dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu *pekerjaan*, *pendidikan*, dan *penghasilan*. Berdasarkan hal ini maka keluarga atau kelompok masyarakat itu dapat digolongkan memiliki sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. (Tan dalam Koentjaraningrat, 1981).

Sehubungan dengan tingkat pendapatan/penghasilan berikut kriteria golongan pendapatan/penghasilan menurut Koentjaraningrat, yaitu:

a. Golongan Berpenghasilan Rendah

Yaitu keluarga yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup yang minimal, mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain karena tuntutan kehidupan yang keras, perkembangan anak dari keluarga itupun menjadi agresif. Sementara itu orang tua yang sibuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan ekonomi tidak sempat memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku anaknya.

b. Golongan Berpenghasilan Sedang.

Yaitu pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

pokok.

c. Golongan Berpenghasilan Tinggi

Yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, sebagian dari pendapatan yang diterima dapat ditabung dan digunakan untuk kebutuhan lain ataupun kebutuhan dimasa mendatang.

Kebutuhan pokok disini sama halnya dngan tingkat hidup minimal mencakup kebutuhan pokok primer yakni kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. (<http://pratama94.wordpress.com>. Blogger: Pratama).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, antara lain pendidikan, pekerjaan, dan pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan.

6. Konsep Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. (Soerjono Soekanto, 1982 ; 22).

Menurut Koentjaraningrat (1994) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

7. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus dipenuhi sebagai pengalaman belajar yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar dalam perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003:10). Seorang anak normal yang tumbuh dewasa maka secara otomatis pemikirannya pun akan berkembang dan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, jika dalam pertumbuhan menuju kedewasaannya diimbangi dengan pendidikan yang baik.

Pendidikan pada dasarnya adalah:

- a. proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan kelakuan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang dipimpin misalnya sekolah sehingga dapat mencapai kesadaran sosial serta dapat mengembangkan pribadinya. (Siti Meichati, 1980 ; 6)

Berdasarkan dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan itu merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia ditinjau dari tumbuhnya rasa percaya diri serta memiliki sikap yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Dan semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang memungkinkan seseorang tersebut mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, jalur pendidikan dibagi menjadi:

b. Jalur Formal

a) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk yang lebih sederajat.

b) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah jurusan, seperti: SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat.

c) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

c. Jalur Nonformal

d. Jalur Informal

8. Konsep Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidup dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan pendapat Bintarto (1986: 27) yang mengemukakan bahwa Pekerjaan merupakan aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan guna memperoleh taraf hidup yang lebih layak dimana corak dan ragamnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tata geografi daerahnya.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa keragaman golongan sosial ditunjukkan dengan adanya perbedaan Pekerjaan yang berpengaruh pada kemampuan ekonomi.

Ditinjau dari aspek ekonomis, bekerja adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan baik berupa uang atau barang dalam kurun waktu tertentu.

Kemudian menurut ICSO (*International Standart Clasification of Oecupation*) pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Professional ahli teknik dan ahli jenis
- b. Kepemimpinan dan ketatalaksanaan
- c. Administrasi tata usaha dan sejenisnya
- d. Jasa
- e. Petani
- f. Produksi dan operator alat angkut

Dari klasifikasi pekerjaan diatas, orang akan dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Dalam masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat di mata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi. Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin dalam ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah

maupus swasta, tenaga administrasi tata usaha.

- b. Pekerjaan yang berstatus sedang yaitu pekerjaan dibidang penjualan dan jasa.
- c. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut/bengkel.

9. Konsep Pendapatan

Seperti yang dikemukakan Kartono Wirosuharjo, dkk (1985: 83) menyatakan bahwa “Pendapatan adalah arus uang atau barang yang di dapat oleh perseorangan, kelompok orang, perusahaan atau suatu perekonomian pada suatu periode tertentu”. Berdasarkan pendapat di atas maka dalam kehidupan usaha rumah tangga pendapatan merupakan hal yang pokok dalam kehidupan usaha rumah tangga tersebut untuk memenuhi segala kebutuhannya sehingga sebagian besar dan kecilnya pendapatan suatu rumah tangga akan sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rumah tangganya.

Pendapatan adalah jumlah keseluruhan dari hasil yang diperoleh baik dari pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan yang dapat dilihat dan diukur dengan rupiah dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan tingkat pendapatan berikut kriteria golongan pendapatan, yaitu:

- a. Pendapatan rendah jika pengeluaran kurang dari Rp. 210.000/ bulan
- b. Pendapatan sedang jika pengeluaran antara Rp. 210.000-Rp. 420.000/ bulan
- c. Pendapatan tinggi jika pengeluaran lebih dari Rp. 420.000/ bulan

Jika pendapatan suatu rumah tangga tinggi, maka sudah pasti kebutuhan pokok rumah tangga tersebut akan terpenuhi.

H. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di seputaran perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena sebagian masyarakat setempat (sekitar perumahan Puri Asoka) sudah benar-benar terkena dampak dari pembangunan perumahan, seperti; harus kehilangan pekerjaan, meski kemudian muncul peluang usaha yang baru. Penelitian dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2015.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Sabar, 2007).

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah seluruh warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, baik yang sebelumnya bekerja sebagai penggarap lahan pertanian/petani ataupun yang sudah beralih ke pekerjaan lain berjumlah 301 orang.

b. Sampel

Pengertian dari sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara *representative* dapat mewakili populasinya (Sabar, 2007).

Menurut Sugiono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus *representative* (Sugiono, 2011).

Sampel dari penelitian ini adalah warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dari seluruh warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo penulis mengambil sampel sebesar 15%.

Dari seluruh warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka nantinya penulis mengambil sampel sebesar 15% sehingga jumlahnya adalah:

$$\% = \frac{15}{100} \times 301 = 45,15 = 45$$

warga masyarakat dan dibulatkan menjadi 45 warga masyarakat.

Alasan mengapa penulis mengambil 15% adalah sesuai pendapat Suharsini Arikunto (2002:112) yaitu apabila jumlah subyek besar atau lebih dari 100, maka sampel diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau bahkan lebih.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*Purposive Sampling*” di mana pengambilan sampel ditentukan dengan kriteria tertentu berdasarkan kebutuhan peneliti.¹³ Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Warga masyarakat Kelurahan Mangunsuman dengan kriteria:

- 1) Warga yang memiliki KTP Kelurahan Mangunsuman
- 2) Warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka paling sedikit dalam waktu tiga bulan.

2. Metode Pengambilan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Cara yang akan digunakan dalam proses pengambilan data adalah:

- 1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.

¹³ Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2010

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara langsung untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

3) Kuisioner

Kuisioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang sudah ada.

Kuisioner juga dapat diartikan daftar pertanyaan yang diberikan atau diajukan ke responden untuk memperoleh jawaban. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan didalam kuisioner.

Pertanyaan dibuat dalam bentuk angket dengan menggunakan skala Likert dengan skor antara 1 – 5 yang masing- masing mewakili pendapat para responden. Adapun isi skala tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Skor 5 : Sangat Setuju (SS)
- b) Skor 4 : Setuju (S)
- c) Skor 3 : Cukup Setuju (CS)
- d) Skor 2 : Tidak Setuju (TS)
- e) Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Responden dalam penelitian ini adalah warga yang tinggal di sekitar perumahan Puri Asoka Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen dan dari literature-literatur yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk ke dalam data sekunder antara lain: profil kelurahan mangunsuman dan catatan lain yang mendukung penelitian ini.

3. Definisi Operasional Variabel

a. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri – ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independent (bebas). Variabel ini disimbolkan huruf (Y). Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Masyarakat Setempat (Y).

Masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Yang menjadi dasar adanya masyarakat setempat adalah lokalitas serta perasaan semasyarakat setempat tersebut. Pada umumnya anggota masyarakat setempat memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya, meskipun pada masyarakat modern dimana perkembangan teknologi dan

Pendidikan Warga Perumahan semakin pesat mengakibatkan ikatan pada tempat tinggalnya semakin berkurang namun dapat memperluas wilayah pengaruh masyarakat setempat yang bersangkutan.

Adapun Indikator Masyarakat setempat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Warga sekitar perumahan Puri Asoka paling sedikit 3 bulan dan setiap hari bersosialisasi dengan masyarakat perumahan (dengan skor 5)
- 2) Warga sekitar perumahan Puri Asoka paling sedikit 3 bulan dan setiap 1-3 hari bersosialisasi dengan masyarakat perumahan (dengan skor 3)
- 3) Warga sekitar perumahan Puri Asoka paling sedikit 3 bulan dan setiap 4-7 hari bersosialisasi dengan masyarakat perumahan (dengan skor 1)

c. Variabel bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependent (terikat). Sehingga variabel independent dapat dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel ini disimbolkan dengan huruf (X). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan (X). Dampak sosial ekonomi adalah akibat (efek) sosial dan ekonomi yang terjadi yang diakibatkan oleh sesuatu faktor lain yang memiliki hubungan. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan (X) sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Hubungan Sosial Warga Perumahan (X_1)

Hubungan sosial adalah hubungan di mana setiap individu menyadari tentang kehadirannya disamping kehadiran individu lain. Hal

ini disebabkan bahwa dengan kata sosial berarti hubungan yang berdasarkan adanya kesadaran yang satu terhadap yang lain yang terjadi di perumahan (Puri Asoka). Dalam hubungan ini setiap individu saling mengakui dan saling mengenal atau *mutual action* dan *mutual recognition*.

Adapun Indikator Hubungan Sosial Warga Perumahan adalah:

- a) Kuantitas hubungan antara warga perumahan Puri Asoka dengan masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)
- b) Kondisi hubungan antara warga perumahan Puri Asoka dengan masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)
- c) Momen pertemuan antara warga perumahan Puri Asoka dengan masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

2) Pendidikan Warga Perumahan (X_2)

Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga seseorang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan (Muhibinsyah, 2003:10). Seorang anak normal yang tumbuh dewasa maka secara otomatis pemikirannya pun akan berkembang dan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, jika dalam pertumbuhan

menuju kedewasaannya diimbangi dengan pendidikan yang baik. Menurut Handoko (2001:192).

Indikator Pendidikan Warga Perumahan adalah:

- b) Tingkat Pendidikan anak-anak warga perumahan Puri Asoka
- b) Tingkat Pendidikan warga dewasa perumahan Puri Asoka
- c) Masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) yang menjadikan tingkat pendidikan warga perumahan Puri Asoka sebagai acuan tingkat pendidikan putra-putrinya.

3) Pekerjaan Warga Perumahan (X₃)

Pekerjaan merupakan suatu aktivitas manusia guna mempertahankan hidup dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai dengan pendapat Bintarto (1986: 27) yang mengemukakan bahwa pekerjaan merupakan aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan guna memperoleh taraf hidup yang lebih layak dimana corak dan ragamnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tata geografi daerahnya.

Indikator Pekerjaan Warga Perumahan adalah:

- a) Keadaan warga perumahan Puri Asoka saat jam kantor/jam kerja (\pm pukul 07.00-15.00).
- b) Tempat Kerja warga perumahan Puri Asoka

- c) Usaha/Pekerjaan masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo) yang berhubungan dengan warga perumahan Puri Asoka.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuisioner tersebut akan dianalisis sebaik mungkin menggunakan berbagai metode agar bermanfaat untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

a. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif adalah suatu metode untuk menganalisis dan mengolah data yang diperoleh dari hasil kuisioner, kemudian akan dianalisis menggunakan metode statistik agar hasilnya valid dan reliabel. Di dalam penelitian ini data yang diperoleh dari jawaban responden berupa kuisioner selanjutnya akan diolah menggunakan SPSS untuk menguji validitas dan reabilitas.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah valid atau tidaknya kuisioner. Suatu data dikatakan valid apabila data tersebut mencakup pokok bahasan yang di ukur dalam kuesioner. Untuk mengukur validitas dari kuesioner yang diberikan kepada responden digunakan *Korelasi Product Moment* dari *Karl Pearson* dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan Rumus :

r_{xy} = Korelasi Product Moment

r = Koefisien korelasi

y = Nilai total skor

x = Skor indikator empiris penelitian

n = Jumlah sampel

Setelah r_{xy} diketahui hasilnya, maka untuk menentukan setiap butir valid atau tidak valid, digunakan taraf signifikan 0,05. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka butir kuesioner dinyatakan valid.

c. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Menurut Ferdinand (2006) sebuah instrumen dan data yang dihasilkan disebut *reliable* atau terpercaya apabila instrumen tersebut secara konsisten memunculkan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran. Suatu data instrumen penelitian dikatakan reliabel menurut Ghazali (2006 : 133) apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60.

$$\text{Rumus : } r_1 = \frac{(2r_b)}{1 + r_b}$$

Keterangan :

r_1 = reabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi product momen

d. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) (Slamet Santoso, 2009: 112). Adapun persamaan regresi yang dipergunakan adalah:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + b_3.x_3 + e$$

Keterangan rumus :

Y = Masyarakat Setempat

a = Konstanta

b_{123} = Koefisien Regresi

X_1 = Hubungan Sosial Warga Perumahan

X_2 = Pendidikan Warga Perumahan

X_3 = Pekerjaan Warga Perumahan

e = Standart Error

e. Uji Koefisien Determinasi

Digunakan untuk menentukan seberapa besar variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X_1 X_2 dan X_3) untuk mendapatkan nilai R^2 (Soedjono, 2005).

Dengan Rumus:

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y + b_2 \sum x_2 y + b_3 \sum x_3 y}{\sum Y^2}$$

Dimana :

R^2 : Koefisien determinasi

Y : Masyarakat Setempat

X₁ : Hubungan Sosial Warga Perumahan

X₂ : Pendidikan Warga Perumahan

X₃ : Pekerjaan Warga Perumahan

b₁ : Koefisien regresi X₁

b₂ : Koefisien regresi X₂

b₃ : Koefisien regresi X₃

f. Uji t (Uji Parsial)

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel – variabel terikat menggunakan uji t (uji parsial). Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05% dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada dampak Hubungan Sosial Warga Perumahan terhadap masyarakat setempat.
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada dampak Pendidikan Warga Perumahan terhadap masyarakat setempat.
- 3) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada dampak Pekerjaan Warga Perumahan terhadap masyarakat setempat.
- 4) ada dampak t_{hitung} diperoleh dengan rumus:

$$t_{tes} = \frac{b}{sb}$$

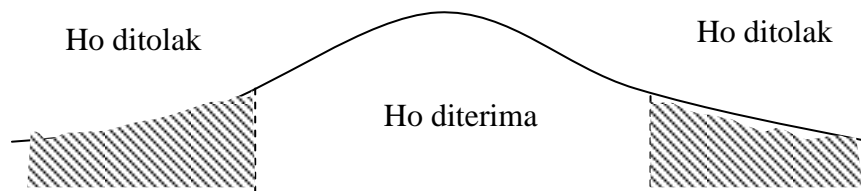
Dimana :

b : Koefisien regresi

S_b : Standar error dari variabel independen

Sedangkan untuk mendapatkan nilai t_{tabel} dapat dilihat dalam tabel distribusi t dengan menentukan degree of freedom (df) : $n - k$ dan nilai α .

5) Gambar 1.1: Daerah penentuan Uji t



g. Uji F (Uji Serempak)

Uji F digunakan untuk melihat bagaimanakah dampak semua variabel bebasnya (Independen) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (dependen) menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05% dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan terhadap Masyarakat Setempat.
- 2) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak ada dampak Sosial Ekonomi Pembangunan terhadap Masyarakat Setempat.

Nilai f dihitung dengan rumus :

$$F \text{ test} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Dimana:

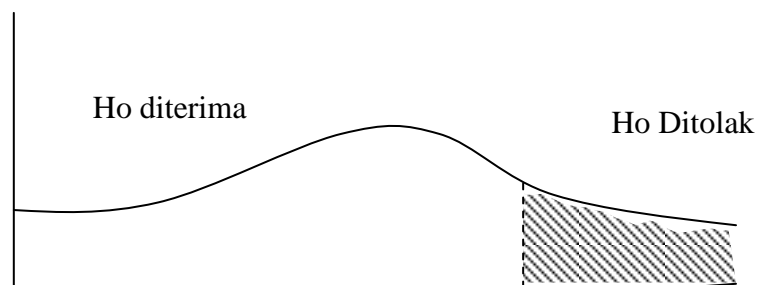
R^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independent

Sedangkan untuk mengetahui nilai F_{tabel} dalam menentukan *degree of freedom* dari nilai α . Degree of freedom adalah $k - 1$ (*horizontal*) dan $n - k$ (*vertikal*)

3) Gambar 1.2: Daerah penentuan Uji F

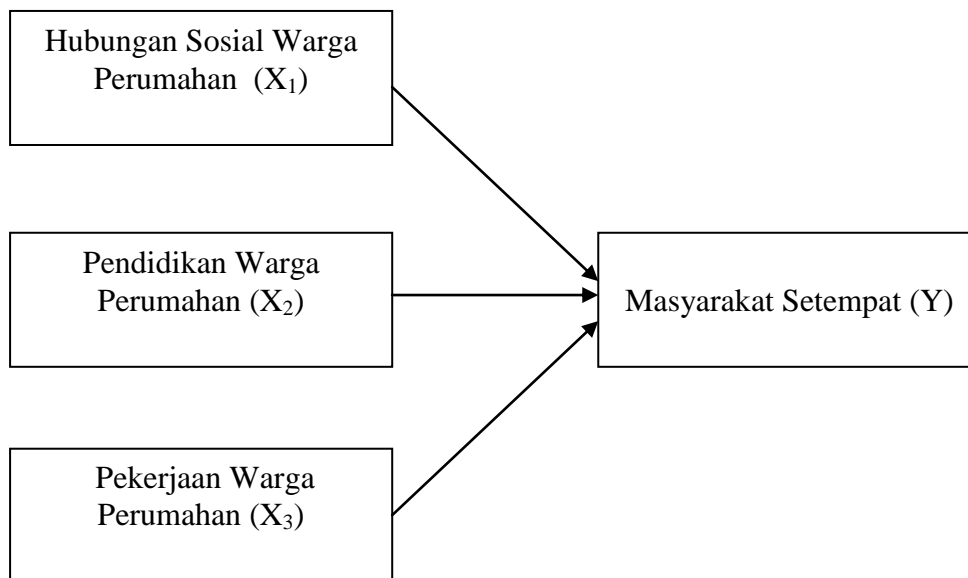


I. Kerangka Pemikiran

Pembangunan perumahan Puri Asoka berdampak sosial ekonomi terhadap warga Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dampak sosial ekonomi tersebut dapat diperinci lagi menjadi; dampak Hubungan sosial warga perumahan, pendidikan warga perumahan, dan pekerjaan warga perumahan terhadap masyarakat Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan pengaruh tiga variabel independen yaitu hubungan sosial warga perumahan, pendidikan warga perumahan, dan pekerjaan warga perumahan terhadap masyarakat setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).

Gambar 1.3
Kerangka pemikiran



Sumber : Dikembangkan oleh Peneliti

J. Hipotesis

Hipotesis merupakan rumusan jawaban atau kesimpulan sementara atau masih bersifat praduga yang harus diuji dengan data yang terkumpul melalui kegiatan penelitian. Hipotesis bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan

pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian. Dari rumusan masalah yang ada, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho: “Tidak ada dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan terhadap Masyarakat Setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).”

Ha: “Ada dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Perumahan terhadap Masyarakat Setempat (Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo).”